

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a) Peristiwa uji coba peluncuran rudal oleh Korea Utara yang melintasi wilayah kedaulatan negara Jepang dapat dikatakan melanggar wilayah kedaulatan negara Jepang. Karena jika ditinjau dari teori *The National Security and Effective Control Theory*, teori ini menyatakan kedaulatan negara di udara dapat dihitung dari sejauh mana suatu negara dapat efektif dan dapat mengontrol ruang udaranya. Sehingga jika ditinjau dari teori ini rudal Korea Utara tersebut melanggar kedaulatan negara Jepang di ruang udara, karena Jepang mampu mendeteksi keberadaan rudal Korea Utara saat melintasi wilayahnya. Hal ini dibuktikan melalui *press release* dari Kementerian Pertahanan Jepang, Pemerintah Jepang memberi perhatian khusus dan himbauan bagi warga yang tinggal di kawasan utara dan timur Jepang meliputi; Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata, dan Nagano. Sistem J-Alert milik pemerintah Jepang sempat aktif pada pukul 6:14 pagi dan mendeteksi keberadaan rudal Korea Utara yang melintasi wilayahnya pada saat ketinggian 2111 km, menghimbau warga untuk tetap berhati-hati dan juga agar segera menghubungi pihak kepolisian atau pemadam kebakaran apabila menemukan puing-puing asing yang diduga merupakan pecahan dari rudal Korea Utara. Sehingga dengan didukung teori ini rudal Korea Utara bisa dikatakan melanggar wilayah kedaulatan udara Jepang, karena Jepang mampu mendeteksi rudal balistik tersebut melalui sistem J-Alert milik pemerintah Jepang.

b) DK PBB dapat memberikan sanksi kepada Korea Utara melalui resolusinya seperti teguran, embargo bahkan sanksi ekonomi sesuai pasal 41 Piagam PBB. Namun apabila dengan cara tersebut tidak efektif dan Korea Utara tetap melanggar resolusi DK PBB, maka DK PBB berhak menjatuhkan sanksi militer melalui darat, laut, dan udara sesuai pasal 42 Piagam PBB. Disamping itu Jepang juga dapat menuntut Korea Utara ke Mahkamah Internasional karena posisi Jepang sebagai negara yang dilanggar wilayah kedaulatannya, dan dirugikan secara ekonomi dikarenakan peristiwa uji coba rudal Korea Utara tersebut sempat mengurangi jumlah wisatawan asing yang hendak ke Jepang.

## **2. Saran**

- a) Demi perdamaian dan keamanan Internasional seharusnya Korea Utara mematuhi resolusi DK PBB kemudian dari pihak Jepang dapat melakukan negosiasi dengan Korea Utara atas peristiwa yang terjadi tersebut dengan mencari solusi terbaik.
- b) Pertama DK PBB sudah memberikan teguran kepada Korea Utara melalui resolusinya, memberikan sanksi ekonomi, namun apabila cara ini tidak efektif sehingga kedepannya Korea Utara tidak mematuhi Resolusi DK PBB, DK PBB dapat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera, yaitu dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi militer kepada Korea Utara.